

Fadli
Fadli 10/11/21

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
ANGGARAN 2020**



**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Koto XI Tarusan. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh OPD Perangkat Daerah Kecamatan Koto XI Tarusan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Koto XI Tarusan 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tarusan, Februari 2021


CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN
DENNY ANGGARA SSTP, M.Ec.Dev
NIP : 19870101 200602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	dst
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat koto XI Tarusan	
2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Camat	
2.3 Penghargaan	
BAB III PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Koto XI Tarusan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada Kantor Camat Koto XI Tarusan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh OPD Kantor Camat Koto XI Tarusan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 OPD Kantor Camat Koto XI Tarusan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Kecamatan Koto XI Tarusan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. LKPj Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Belanja Kecamatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kecamatan Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor....Tahun... 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPj Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah laporan LKPj Kantor Camat Koto XI Tarusan tahun anggaran 2020.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun..... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor... Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan LKPj OPD Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menjabarkan arahan Rencana Kegiatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
2. mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan
3. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini.

1.3.2 Tujuan

Untuk melaporkan realisasi pelaksanaan misi kecamatan Koto XI tarusan Kabupaten Pesisir selatan, perlu ditetapkan tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Koto XI Tarusan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 sehingga tercapainya rencana tahunan untuk meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Pemerintah Daerah di Kecamatan koto XI Tarusan

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Persen	85	100	Capaian Indeks Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebesar 80 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehidupan sosial dan kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Koto XI Tarusan berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa hubungan antar penganut agama serta hubungan sosial tercipta secara toleran dan tidak terdapat gesekan yang berarti.
2	Pembinaan kelembagaan Sosial,Keagamaan.	Persen	80	80	
3	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	BB	BB	

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata nilai pelayanan Publik	Persen	85	100	Capaian Indeks Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebesar 80 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehidupan sosial dan kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Koto XI Tarusan berada dalam kategori tinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa hubungan antar penganut agama serta hubungan sosial tercipta secara toleran dan tidak terdapat gesekan yang berarti.
2.	Pembinaan kelembagaan Sosial,Keagamaan	$\frac{\text{Jmlh TPQ X 100\%}}{\text{Jmlh Mesjid}}$	Persen	80	80	
3.	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai Evaluasi dari Inspektorat.	Nilai	BB	BB	

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Tindak lanjut	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Umum	Kecamatan Koto XI Tarusan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	I. Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa administrasi Keuangan 4. Penyediaan jasa	Ketersediaan Pelayanan Adm. Perkantoran Terlaksananya pembayaran Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pembayaran Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran honor dan operasional Pengelolaan keuangan Terlaksananya pembayaran	bln Bln sda sda	100 sda 100 Sda 100	98.54 99.99 100 100 99.99	176.618.180 10.997.000 460.000 3.362.500 32.384.800	174.041.580 10.996.000 460.000 3.362.500 32.380.500.	- - - -	- -	

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pemana Sahaan	Tindak lanjut
				Kebersihan kantor	jasa kebersihan ktr	bln	100	100	14.346.500.	14.346.500.1		
				5.Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis Kantor	bln	100	99,96	18.668.980	18.668.600		
				6.Penyediaan brg cetakan dan Penggandaan	Tersedianya brg cetakan dan Penggandaan dokumen.	bln	100	99,96	20.675.400	20.667.400		
				7.Penyediaan komponen Instansi listrik /penerangan Bangunan Ktr	Tersedianya komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan	bln	100	99,89	7.003.000	6.985.000		
				8.Penyediaan bhn Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bhn bacaan dan peraturan per undang-undangan	bln	100	100	4.500.000	4.500.000.		
				9.Penyediaan Makan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	bln	100	99,97	28.380.000	28.372.500.		
				10.Rpt-rpt koord. dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	bln	100	98,04	1.912.500	1.875.000		

No	Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Persentase Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi	Terdapat
				11. Rpt-rpt koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah.	bln	100	99,63	29.950.000	29.840.000		
				2. Program peningkatan sarana dan Prasarana	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur.							
				1. Pemeliharaan /rutin berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gdg Kantor.	bln	100	100	2.956.150	2.956.150		
				2. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas.	Bln	100	99,65	24.335.000	24.250.500		
				3. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gdg kantor.	Terpeliharanya peralatan gdg katr.	Bln	100	98,03	3.050.000	2.990.000		
				3. Program pengembangan	Tercapainya pengembangan lingkungan yg							

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasa Solusi	Tindakan lanjut
				lingkungan Sehat	sehat.							
				1.Fasilitasi dan pembinaan Lingkungan Sehat	Terlaksananya pembinaan lingkungan sehat	Bln	100	100	460.000	460.000		
				4.Program pemberdayaan lembaga sosial masyarakat nag.	Persentase lembaga sosial yg aktif							
				1.Fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi Masyarakat.	Terciptanya pembinaan lembaga sosial yg aktif	Bln.	100	100	3.362.500	3.362.500		
				5.Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti.							
				1.Fasilitasi penyelesaian permasalahan.	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti	Bln	100	100	10.957.500	10.957.500		
				6.Program Pengembangan	Persentase							

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Tindak lanjut
				Kawasan Pedesaan	pengembangan kawasan pedesaan							
				1.Pembinaan potensi Kawasan masyarakat Pedesaan/Nagari	Terlaksananya pembinaan potensi kawasan Masy. Desa	Bln	100	100	1.530.000	1.530.000		
				7.Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.	Jumlah Rekomendasi yg di keluarkan							
				1.Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.	Bln	100	100	960.000	960.000		
				8.Program kerja sama Pembangunan	Jumlah dokumentasi kerja sama yg disusun							
				1.Koord. spasial kerja sama	Terlaksananya koordinator	Bln	100	100	2.235.000	2.235.000		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut
				wilayah dan perbatasan	antar perbatasan wilayah								
				9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan keg. musrembang Nag. yg diferifikasi sesuai dgn program prioritas								
				1. Penyelenggaraan Musrembang RKPD	Jumlah musrembang rkpd yg dilaksanakan di Kec.								
				10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase tata kelola keuangan Nagari yg Baik	Bln	100	100	5.605.000	5.605.000			
				1. Fasilitasi	Tersedianya								

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Tindak lanjut
				monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	operasional pembinaan pemerintahan Nagari	Bln	100	100	6.930.000	6.930.000		
				11.Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan kawasan pariwisata							
				1. Pelaksanaan dan ke ikut sertaan Even ke Pariwisata	Terlaksananya ke ikut sertaan Even ke pariwisata	Persen	100	100	1.000.000	1.000.000		

Tabel 2.3.

Penghargaan yang Diraih oleh OPD Kantor Camat Koto XI Tarusan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

BAB III PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pasiah Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Koto XI Tarusan berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul salah satunya kurang maksimal kegiatan kunjungan ke Nagari nagari diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Koto XI Tarusan pada Tahun Anggaran 2020 patut diayukuri karena dengan adanya Pandemi COVID ini Kegiatan pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Insya Allah tercapai dengan maksimal. Kegiatan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses sebagai mana mestinya.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Kecamatan Koto XI Tarusan membuka selbar-lebarnya untuk menerima saran dan kritiknya dari Pemerintah Kabupaten.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kantor Camat Koto XI Tarusan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja Kantor Camat Koto XI Tarusan senantiasa dapat lebih baik dan ada peningkatan.

Bemoga Allah BWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

----- 000 -----